



Sistem Pendidikan Indonesia

Yola Septia Utami¹, Deli Meylindo², Asiyah^{3*}

¹⁻³Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

*Penulis Korespondensi: asiyah@mail.uinfasbengkulu.ac.id³

Abstract. *This study aims to examine the development, challenges, and prospects of the Indonesian education system from a historical, regulatory, and curriculum perspective. Using a descriptive qualitative method with a library study approach, this study examines relevant literature, laws and regulations, and previous research findings. The study results indicate that the Indonesian education system is a dynamic entity, influenced by internal and external factors from the Hindu-Buddhist era, the arrival of Islam, colonialism, to the Reformation era and the Independent Curriculum. A strong legal basis through the 1945 Constitution and Law Number 20 of 2003 provides a basic framework for national education, but in practice, challenges still arise in the form of disparities in quality between regions, limited facilities, and educator readiness. The Independent Curriculum is one of the latest innovations that emphasizes flexibility, 21st-century competencies, and the Pancasila student profile, although its implementation faces technical and resource constraints. This research emphasizes the importance of consistent education policies, strengthening teacher competencies, and equalizing access and facilities as strategic steps in realizing the national goal of enlightening the nation's life and preparing a generation with character, innovation, and the ability to compete globally.*

Keywords: *Curriculum; Education Policy; Education System; Indonesia; National Education*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan, tantangan, dan prospek sistem pendidikan di Indonesia dalam perspektif historis, regulatif, serta kurikulum. Melalui metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini menelaah literatur, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem pendidikan Indonesia merupakan kesatuan yang dinamis, dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal sejak masa Hindu-Buddha, masuknya Islam, kolonialisme, hingga era Reformasi dan Kurikulum Merdeka. Landasan hukum yang kuat melalui UUD 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 memberi kerangka dasar bagi pendidikan nasional, namun dalam praktiknya masih dihadapkan pada tantangan berupa kesenjangan kualitas antarwilayah, keterbatasan fasilitas, dan kesiapan pendidik. Kurikulum Merdeka menjadi salah satu inovasi terbaru yang menekankan fleksibilitas, kompetensi abad ke-21, serta profil pelajar Pancasila, meski implementasinya menghadapi hambatan teknis dan sumber daya. Penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi kebijakan pendidikan, penguatan kompetensi guru, serta pemerataan akses dan fasilitas sebagai langkah strategis dalam mewujudkan tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyiapkan generasi yang berkarakter, inovatif, serta mampu bersaing secara global.

Kata kunci: Indonesia; Kebijakan Pendidikan; Kurikulum; Pendidikan Nasional; Sistem Pendidikan

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan bangsa karena berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sistem pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter, pengembangan keterampilan, serta internalisasi nilai-nilai budaya dan moral. Dalam konteks Indonesia, peran strategis pendidikan ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan tujuan “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagai salah satu cita-cita nasional.

Seiring perkembangan zaman, sistem pendidikan Indonesia mengalami berbagai dinamika mulai dari masa Hindu-Buddha, masuknya Islam, kolonialisme, hingga era Reformasi dan Kurikulum Merdeka. Perubahan kurikulum yang terus terjadi menunjukkan adanya upaya adaptasi terhadap tantangan internal, seperti arah kebijakan politik dan kualitas sumber daya manusia, maupun pengaruh eksternal berupa globalisasi, perkembangan teknologi, serta tuntutan kompetensi abad ke-21. Beberapa penelitian terdahulu (Nurwahyuni & Hudaidah, 2021; Hanipudin, 2019) menegaskan bahwa transformasi pendidikan di Indonesia berlangsung secara dinamis, namun implementasinya kerap menghadapi hambatan seperti kesenjangan kualitas antarwilayah dan kesiapan pendidik.

Kebaruan kajian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai sistem pendidikan Indonesia dari perspektif historis, regulatif, dan kurikulum terbaru. Penelitian sebelumnya cenderung menyoroti satu aspek tertentu, misalnya sejarah perkembangan atau kebijakan kurikulum, sedangkan penelitian ini berusaha mengintegrasikan ketiganya untuk memberikan gambaran yang lebih utuh. Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat adanya tantangan nyata dalam implementasi Kurikulum Merdeka, seperti keterbatasan fasilitas dan kesenjangan antar sekolah.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan, tantangan, dan prospek sistem pendidikan di Indonesia. Melalui pendekatan ini diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana sistem pendidikan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus menyiapkan generasi yang berakarakter, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat global.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian ini mencakup teori mengenai sistem, pendidikan, serta sistem pendidikan nasional yang diatur dalam regulasi dan pemikiran para ahli.

Teori Sistem dalam Pendidikan

Pendekatan sistem merupakan salah satu kerangka analisis penting dalam menilai kualitas pendidikan. Menurut Sanjaya (2007), sistem adalah suatu kesatuan komponen yang saling berkaitan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan, komponen tersebut meliputi tujuan, kurikulum, tenaga pendidik, peserta didik, sarana prasarana, serta lingkungan belajar yang saling mendukung. Hamalik (2002) juga menegaskan bahwa sistem adalah seperangkat unsur yang berinteraksi secara terpadu untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pendidikan dapat dipandang sebagai sebuah sistem yang hanya akan efektif apabila seluruh komponennya berjalan secara harmonis.

Konsep Pendidikan

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan potensi manusia. Aristoteles menyatakan bahwa pendidikan merupakan fungsi negara yang bertujuan mencapai kebaikan bersama. Socrates memandang pendidikan sebagai sarana untuk menemukan kebenaran melalui metode dialektika. Dalam konteks modern, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensi spiritual, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Langeveld bahwa pendidikan membantu individu menjadi mandiri dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupannya.

Sistem Pendidikan Nasional Indonesia

Sistem pendidikan nasional merupakan upaya terpadu untuk mencetak manusia Indonesia seutuhnya. Sunarya (dalam Juhri, 2010) menekankan bahwa pendidikan nasional dilandasi falsafah bangsa dengan tujuan mengabdikan pada cita-cita nasional. Landasan hukum mengenai sistem pendidikan di Indonesia tertuang dalam UUD 1945 Pasal 31 dan dipertegas melalui UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional berakar pada nilai-nilai Pancasila, kebudayaan bangsa, serta tanggap terhadap perubahan zaman. Mastuhu (1994) dalam karyanya *Dinamika Pesantren* menjelaskan bahwa sistem pendidikan adalah totalitas interaksi antar unsur pendidikan yang saling melengkapi, baik unsur organik seperti pendidik dan peserta didik, maupun unsur anorganik seperti sarana dan prasarana.

Perubahan Kurikulum sebagai Teori Dinamis Pendidikan

Perubahan kurikulum di Indonesia menggambarkan sifat dinamis dari pendidikan sebagai sistem. Menurut Hamid dkk. (2020), pengembangan kurikulum merupakan bentuk adaptasi pendidikan terhadap tuntutan zaman. Kurikulum 1947 hingga Kurikulum Merdeka tahun 2022 menunjukkan adanya respon terhadap perubahan politik, sosial, ekonomi, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum Merdeka, misalnya, menekankan fleksibilitas, penguatan kompetensi abad ke-21, serta profil pelajar Pancasila sebagai orientasi utama. Hal ini membuktikan bahwa sistem pendidikan selalu berada dalam arus perubahan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah menelaah berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan sistem pendidikan di Indonesia. Data yang digunakan berasal dari buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen resmi seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, dan mencatat informasi penting dari sumber-sumber yang relevan. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai konsep, perkembangan, serta dinamika sistem pendidikan di Indonesia. Analisis dilakukan dengan cara mereduksi data yang tidak relevan, menyajikan data dalam bentuk uraian yang runtut, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan hasil telaah literatur. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menyajikan pemahaman yang jelas tentang sistem pendidikan Indonesia, baik dari segi teoritis, historis, maupun implementatifnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Sistem Pendidikan Indonesia

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan kualitas proses pendidikan adalah pendekatan sistem. Melalui pendekatan sistem kita dapat melihat berbagai aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu proses. Kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu “*systema*” yang berarti “cara, strategi”. Dalam bahasa Inggris “*system*” berarti “sistim, susunan, jaringan, cara”. Sistem juga diartikan sebagai suatu strategi, cara berpikir atau model berpikir (Sanjaya, 2007)

Menurut Wina Sanjaya, “*Sistem adalah satu kesatuan komponen yang satu sama lain saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diterapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan*”. Omar Hamalik menyatakan bahwa “*Sistem adalah seperangkat komponen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk suatu tujuan*”. Sedangkan menurut Imam Barnadib dalam bukunya Ramayulis, “*Sistem adalah suatu gagasan atau prinsip yang bertautan, yang tergabung menjadi satu keseluruhan*” (Hamalik, 2002).

Pengertian pendidikan umumnya ialah suatu bentuk proses belajar mengajar pengetahuan, keterampilan serta kebiasaan pada suatu generasi ke generasi yang lainnya dan dididik seseorang secara langsung atau juga dengan otodidak. Secara etimologi pendidikan

asalnya dari bahasa latin “*ducare*” berarti memimpin, menuntun, serta mengarahkan, sedangkan “*e*” berarti keluar, maksudnya dari dalam ke keluar atau dari sedikit menjadi banyak. Pendidikan membimbing seseorang bebas dari ketidaktahuan menjadi tahu tentang ilmu pendidikan (Ainun, 2020)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.”

Pendidikan dipahami sebagai bentuk metode untuk mengembangkan pengetahuan akan wawasan, keahlian, adat budaya serta sikap-sikap yang diharap dapat menjadikan seseorang lebih baik. Menurut Aristoteles pendidikan adalah fungsi Negara, yang dilakukan demi tujuan dari Negara itu tersendiri. Sementara menurut Socrates pendidikan adalah batu loncatan, alat bantu atau bentuk sarana yang dipergunakan agar mendapatkan kebenaran sedang metodenya ialah dialektika.

Prof. Dr. Imam Barnadib mengemukakan pendidikan merupakan bentuk usaha sadar yang sistematis agar tercapainya suatu taraf kehidupan menjadi kemajuan yang lebih baik. Sementara M. J Laangeveld berpendapat pendidikan ialah bentuk dari usaha untuk menolong peserta didik agar dapat melakukan tugas-tugas dalam hidupnya, menjadi mandiri serta bertanggung jawab. Sementara itu Ahmad D. Marimba dan Mahmud mengemukakan pendidikan merupakan suatu bimbingan jasmani dan rohani agar terbentuknya kepribadian utama serta membimbing keahlian jasmaniah dan rohaniah demi sikap nyata yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat.

Pendidikan pada hakikatnya ialah suatu keterkaitan antar komponen-komponen yang melekat di dalam usaha memperoleh tujuan pendidikan. Harmonisasi dan keterpaduan bersama hubungan unsur esensial pendidikan, atas fase operasional dirasakan sebagai faktor penentu dari keberhasilan pendidikan. Keberhasilan dari suatu pendidikan didukung dari berbagai hal, yang diantaranya adalah pengembangan sistem pendidikan. Pengembangan merupakan metode meningkatnya layanan pendidikan, dan pengayaan metode serta media pembelajaran. Dalam mengembangkannya harus diupayakan adanya profesionalitas pendidikan yang mumpuni karena pendidik adalah aset utama dalam pendidikan (Mahmud, 2013).

Menurut Sunarya, Pendidikan Nasional ialah sistem pendidikan yang berdiri berdasarkan landasan-landasan yang dijiwai oleh falsafah kehidupan bangsa yang tujuannya

bersifat mengabdikan terhadap keinginan serta cita-cita nasional suatu bangsa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengemukakan bahwa: “Pendidikan Nasional adalah suatu usaha yang membimbing para warga Negara Indonesia menjadi Pancasila, yang berkepribadian berdasarkan ketuhanan berkesadaran masyarakat dan mampu membudayakan alam sekitar.” (Pramuka, 2016).

Dikutip dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No.2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab I Pasal 1 ayat 2 berbunyi: “Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar dari pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”. Dasar ini dapat dilihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIII Pasal 31 bahwa tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran dan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang (Saiin, 2017).

Pendidikan Nasional ialah bentuk usaha pendidikan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan berakar atas nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia serta tanggap atas tuntutan perubahan zaman. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa pendidikan nasional mewujudkan semua warga Negara Indonesia meningkat sebagai manusia yang bermutu tinggi sehingga dapat menghadapi tantangan zaman yang kian berubah (Juhri, 2010).

Menurut Mastuhu yang di sebutkan dalam bukunya yang berjudul *Dinamika Pesantren* menjelaskan bahwa: “Sistem pendidikan adalah totalitas interaksi dari seperangkat unsur-unsur pendidikan yang bekerja sama secara terpadu, dan saling melengkapi satu sama lain menuju tercapainya tujuan pendidikan yang telah mencapai cita-cita bersama para pelakunya. Kerjasama antar pelaku ini didasari, dijiwai, digerakkan, digairahkan, dan diarahkan oleh nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh mereka. Unsur-unsur suatu Sistem Pendidikan terdiri dari unsur organik dan unsur anorganik seperti dana, sarana, dan alat-alat pendidikan lainnya dimana antara unsur-unsur dan nilai-nilai yang ada dalam sistem pendidikan tidak bisa terpisahkan dan harus saling menyatu” (Kamaruddin).

Sistem pendidikan merupakan himpunan gagasan atau prinsip-prinsip yang saling berkaitan. Setiap gagasan memiliki peran dalam membentuk kesatuan yang utuh. Dengan demikian, sistem pendidikan menjadi satu keseluruhan yang terpadu.

Sejarah Sistem Pendidikan di Indonesia

Sistem Pendidikan pada Masa Hindu Budha

Sekitar abad ke-5, agama Hindu dan Budha masuk ke Indonesia. Hindu dan Budha merupakan dua agama yang berbeda, namun dalam praktiknya di Indonesia, kedua agama tersebut mempunyai keyakinan yang sama, yaitu dengan menganggap bahwa sumber Yang Maha Tinggi yaitu persatuan antara figur Syiwa dengan Budha. Pendidikan pada masa Hindu Budha dilaksanakan dengan berlandaskan agama sebagai pedoman. Seni pembuatan patung-patung dan candi-candi pun tidak terlepas dari pengaruh agama. Begitu pula seni bela diri dan perang yang mereka dapatkan dari orang tuanya.

Pada sekolah formal, para murid nya adalah orang yang berasal dari kasta ksatria yaitu anak-anak raja dan bangsawan dan para pendidiknya adalah kasta Brahmana yang merupakan orang yang terpelajar dan paham agama. Dalam pendidikan keagamaan Hindu-Budha, beberapa materi pelajaran yang ada dan dipelajari yaitu ilmu agama, bahasa dan sastra, ilmu-ilmu kemasyarakatan/sosial, ilmu-ilmu eksakta, serta ilmu pasti yang meliputi ilmu perhitungan, seni bangunan, seni rupa dan sebagainya (Nurwahyuni & Hudaidah, 2021).

Sistem Pendidikan pada Masa Islam

Islam masuk ke Indonesia tidak diketahui secara pasti waktunya. Menurut beberapa teori, ajaran agama Islam mulai diperkenalkan di Indonesia oleh orang-orang dari berbagai bangsa. Mereka datang ke Indonesia untuk berdagang sembari berdakwah. Ada empat teori yang terkait dengan masuknya Islam ke Indonesia. Pertama, menurut teori Gujarat, Islam datang ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi dan dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India. Pedagang dari Gujarat datang dan berdakwah di bagian barat nusantara sehingga terbentuklah kerajaan Samudera Pasai yang merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia (Budiarti, 2018).

Kedua, menurut teori Mekkah (Arab) Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dibawa oleh orang-orang arab yang berdagang dan menikah di Indonesia. Teori ini didukung oleh Buya Hamka yang memberikan bukti bahwa telah ada pemukiman Islam di Sumatera bagian barat. Ketiga, yaitu teori Persia (Iran) yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan dibuktikan dengan kesamaan budayanya. Keempat, teori Cina menyebutkan bahwa Islam diperkenalkan pertama kali oleh orang berbangsa Cina. Pada masa dinasti Tang, ajaran Islam berkembang pesat di Cina. Awal mula perkembangan Islam di China dibawa oleh panglima muslim yaitu Saad bin Abi Waqqash dari kekhalifahan Ustman bin Affan yang berkuasa di Madinah.

Pendidikan Islam di Indonesia telah memasuki usia yang hampir sama dengan kemerdekaan Indonesia. Hal itu karena awal mula tumbuhnya semangat untuk merdeka berasal dari Lembaga-lembaga Islam. Jiwa-jiwa nasionalisme mulai muncul dari lembaga pendidikan Islam pada masa itu, yaitu dari pesantren, surau/masjid serta madrasah. Hal itu membuat kolonial sangat menentang adanya Lembaga keagamaan Islam untuk dapat berkembang di Indonesia (Hanipudin, 2019).

Pada masa itu, Lembaga Pendidikan yang paling sederhana adalah surau/langgar. Para murid diajarkan ilmu agama seperti membaca Al-Quran dan fiqih dasar oleh guru mengaji. Selanjutnya ada pesantren yang merupakan Lembaga Pendidikan dengan sistem pemondokan yang dibina oleh kyai-kyai dan mempelajari hanya tentang ilmu keagamaan. Yang ketiga yaitu madrasah yang sistem pendidikannya tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan lainnya.

Sistem Pendidikan pada Masa Portugis

Pada abad ke-16, Indonesia mengalami perkembangan ekonomi yang cukup pesat sehingga memancing bangsa Portugis disusul dengan Spanyol. Pada masa itu, bangsa Portugis tidak hanya melakukan jual beli, tetapi juga melakukan penyebaran agama Khatolik. Mereka juga berinisiatif untuk membangun sekolah-sekolah yang dapat digunakan untuk mempermudah penyebaran agama. Hal itu terwujud pada tahun 1536 di Ternate yang merupakan sekolah pertama pada masa itu. Agama Nasrani berkembang luas pada masa itu hingga akhirnya terjadi pemberontakan-pemberontakan yang menyebabkan runtuhnya kekuasaan Portugis di Indonesia.

Sistem Pendidikan di Indonesia pada Masa Orde Lama

Masa orde lama diawali dengan pasca kemerdekaan yang dipimpin oleh presiden pertama yaitu Ir. Soekarno. Pada masa itu, Pendidikan di Indonesia masih melanjutkan apa yang telah diterapkan dahulu oleh Jepang dan menggunakan Bahasa pengantar Bahasa Indonesia. Media pembelajaran pada masa itu menggunakan buku-buku yang diterjemahkan dari Bahasa Belanda ke dalam Bahasa Indonesia yang sudah dilakukan sejak zaman Jepang. (Fadli & Kumalasari, 2019)

Di bawah kekuasaan presiden Soekarno, Pendidikan diberikan ruang yang cukup bebas. Pada masa ini Indonesia dapat mengekspor guru ke negara tetangga, dan banyak generasi muda yang dikirim ke luar negara untuk menempuh Pendidikan agar kelak dapat Kembali lagi ke negeri sendiri untuk menerapkan pengetahuan yang telah mereka dapatkan. Berbeda dengan zaman kolonial, pada masa ini, Pendidikan dianjurkan untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa

memandang kasta sebagai anak bangsawan atau sebagainya. Semua orang berhak mendapatkan Pendidikan dan pengajaran yang sama antara satu dengan yang lain.

Sistem Pendidikan di Indonesia pada Masa Orde Baru

Masa orde baru dipimpin oleh presiden kedua Republik Indonesia Soeharto dan berlangsung selama 20 tahun yaitu berawal dari tahun 1968 sampai 1998. Pada pendidikan Orde Baru hak untuk mendapatkan kesetaraan pendidikan tidak terpenuhi karena pemerintah masih mendominasi dalam Pendidikan para pelajar. Para peserta didik diberikan banyak beban materi yang harus dipelajari tanpa memperhatikan keberhasilan dalam Pendidikan itu sendiri. Pada masa itu, Pendidikan ditujukan untuk kepentingan pemerintah guna untuk pembangunan nasional. Mereka ingin melahirkan banyak tenaga terdidik tanpa memikirkan kualitas dari tenaga terdidik tersebut. Akibatnya mereka menjadi tenaga terdidik dengan tingkat kepekaan sosial yang rendah. Pada masa ini, pelajar di didik untuk menjadi seorang pekerja yang kelak akan berperan sebagai alat untuk menjalankan pemerintahan.

Ditambah lagi dengan adanya sistem doktrinisasi yang diterapkan dalam Pendidikan Indonesia. Kurikulum 1975 menjadi kurikulum pertama pada masa Orde Baru yang menerapkan indoktrinasi ideologi Pancasila untuk seluruh jenjang pendidikan. Melalui indoktrinasi ini, pemerintah menanamkan konsep sila-sila Pancasila yang menjadi awal praktik pengajaran melalui sistem hafalan. Para peserta didik ditanamkan paham-paham orde baru agar selalu melekat dalam ingatan mereka serta menolak segala bentuk budaya asing yang masuk di Indonesia. Akibatnya mereka jadi takut untuk membuat sesuatu yang baru di luar paham yang telah ditanamkan. Mereka tidak bisa bebas berpendapat dan bereksplorasi serta tumbuh di bawah sistem pemerintahan yang otoriter (Nurwahyuni & Hudaidah, 2021).

Sistem Pendidikan pada Masa Reformasi

Setelah presiden Soeharto meletakkan jabatannya pada tahun 1998, dimulailah masa reformasi atau masa perubahan. Perubahan yang paling signifikan adalah adanya otonomi daerah termasuk otonomi Pendidikan. pada masa ini, Pendidikan diberikan ruang seluas-luasnya untuk dapat berkembang dengan bebas. Bahkan, aturan-aturan pada masa orde baru ditinjau Kembali dan apabila ada aturan yang menghambat kebebasan siswa akan dicabut.

Selain daripada itu, untuk memperbaiki sistem Pendidikan Indonesia, diterapkan kebijakan pendidikan lainnya yang juga untuk menjamin pelaksanaan pendidikan nasional. Pemerintahan B.J. Habibie pada tahun 1999 mulai membebaskan uang bayaran untuk jenjang pendidikan SD sampai SMTA. Gaji para guru juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Hal itu berarti bahwa pada masa reformasi, sistem Pendidikan di Indonesia telah mengalami perbaikan dan kemajuan.

Sistem Pendidikan Indonesia pada masa reformasi juga mengalami beberapa pergantian kurikulum. Pertama, kurikulum 1999 yang merupakan lanjutan dari kurikulum 1994 dengan sedikit perubahan. Kedua, kurikulum 2004 atau KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi). Tiga unsur pokok yang terkandung dalam Program pendidikan dengan kurikulum KBK yaitu: pemilihan kompetensi yang sesuai; spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi; dan pengembangan pembelajaran.

Ketiga, kurikulum 2006 atau KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dasar dan guru dituntut untuk dapat mengembangkannya dalam bentuk silabus. Keempat, kurikulum 2013. Tujuan dari kurikulum 2013 adalah untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia menjadi manusia yang memiliki kemampuan hidup sebagai warga negara yang baik, kreatif, inovatif, produktif serta mampu bersaing demi kemajuan peradaban negara bahkan dunia (Nurwahyuni & Hudaidah, 2021).

Jenis-Jenis, Jalur dan Jenjang Pendidikan di Indonesia

Jenis Pendidikan

Jenis pendidikan bergabung dengan di dasarkan pada tujuan dan fungsi pendidikan dalam satuan pendidikan. Jenis pendidikan menurut pasal 1 ayat 9 UU No 20 tahun 2003 menjelaskan sistem pendidikan nasional ialah gabungan yang mendasarkan pada fungsi dan tujuan pendidikan dalam satuan pendidikan, ada 8 jenis pendidikan yang terdiri dari: (1) Pendidikan umum, (2) pendidikan kejuruan, (3) pendidikan akademik, (4) pendidikan profesi, (5) pendidikan vokasi, (6) pendidikan keagamaan, (7) pendidikan khusus, (8) pendidikan kedinasan (Syafi'i, 2020).

a. Pendidikan Umum

Pendidikan umum ialah pendidikan dasar dan menengah untuk menjadikan pengetahuan yang kita perlu sebagai peserta didik untuk lanjut pendidikan ke jenjang yang semakin tinggi. Misalnya: sekolah dasar (SD), sekolah menengah (SMP), Sekolah menengah atas (SMA).

b. Pendidikan Kejuruan

Pendidikan kejuruan ialah pendidikan untuk menyiapkan orang supaya kerja keras kepada satu bidang pekerjaan atau satu bidang pekerjaan kepada bidang-bidang pekerjaan yang lain. Hanalik mengemukakan pendidikan kejuruan ialah cara bentuk untuk mengembangkan potensi, baik pendidikan dasar keterampilan dan seperti-seperti yang menuju pada dunia kerja yang selalu di lihat sebagai Latihan keterampilan selanjutnya. (Septiani, 2023).

Djohar juga mengemukakan pendapatnya pendidikan kejuruan ialah cara bentuk pendidikan untuk menyiapkan seorang peserta didik sebagai tenaga kerja yang handal dan mampu untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Karakteristik pendidikan kejuruan menurut Djohar terdiri atas beberapa aspek penting. Pertama, pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang memiliki karakteristik untuk menyiapkan tersedianya tenaga kerja. Kedua, pendidikan ini berorientasi pada kebutuhan tenaga kerja di dunia ritel dan industri. Ketiga, pengalaman belajar yang diperoleh melalui pendidikan kejuruan mencakup aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik yang dapat diterapkan baik dalam situasi kerja maupun dalam proses belajar mengajar. Keempat, pendidikan kejuruan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu keberhasilan siswa di sekolah dan keberhasilan lulusan ketika terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya. Kelima, pendidikan kejuruan harus peka terhadap perkembangan dunia ritel, sehingga dituntut untuk responsif dan proaktif terhadap kemajuan wawasan dan teknologi. Keenam, kerja praktik dan laboratorium merupakan sarana utama dalam pendidikan kejuruan karena dapat menciptakan situasi pembelajaran yang realistis dan edukatif sesuai dengan kondisi dunia kerja.

c. Pendidikan Akademik

Pendidikan akademik ialah sistem pendidikan tinggi untuk mengarahkan kepada kuasa dan berkembangnya kedisiplinan ilmu pengetahuan teknologi, dan seni, yang mencakup ke dalamnya misalkan sarjana magister, dan doktor. Gelar sarjana Teknik S.T., sarjana kedokteran ialah S.Med., sarjana pendidikan bergelar S.Pd.

d. Pendidikan Profesi

Pendidikan profesi ialah pendidikan tinggi sesudah program sarjana dengan menyiapkan peserta didik agar mendapat pekerjaan untuk syarat keahlian khusus, lulusan pendidikan profesi mencakup sebagai contoh sesudah bergelar S.E seseorang mampu menjadi pendidikan profesi akuntan, jadi beliau bergelar S.E. Ak., dan selanjutnya seperti itu.

e. Pendidikan Vokasi

Pendidikan vokasi ialah pendidikan tinggi untuk menyiapkan peserta didik dengan memilih pekerjaan yang sesuai yang beliau miliki maksimal setara untuk program sarjana yang memiliki diploma 1, diploma II, diploma III, dan diploma IV (Septiani, 2023).

f. Pendidikan Keagamaan

Pendidikan keagamaan ialah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi untuk menyiapkan peserta didik supaya bisa memiliki peranan dengan menuntut ilmu pengetahuan secara agama atau menjadi ilmu agama.

g. Pendidikan Khusus

Pendidikan khusus ialah menyelenggarakan pendidikan dengan peserta didik yang mempunyai kecerdasan yang sangat bagus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

h. Pendidikan Kedinasan

Pendidikan kedinasan ialah pendidikan profesi untuk menyelenggarakan oleh menteri- menteri yang lain, sesuai lembaga pemerintah non-kementrian yang bertujuan supaya meningkatkan untuk mampu dan terampil dalam melaksanakan tugas kedinasan untuk pegawai negeri atau calon pegawai negeri.

Jalur Pendidikan

Jalur pendidikan menurut UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan ialah wahana untuk dilewati peserta didik supaya berkembang potensi diri untuk proses pendidikan yang menjurus kepada tujuan pendidikan. Menurut undang undang berikut, jalur pendidikan mencakup atas pendidikan formal (jalur pendidikan yang mempunyai struktur dan jenjang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi), pendidikan nonformal (jalur pendidikan di luar pendidikan formal untuk kita dapat melaksanakan secara struktur dan berjenjang), dan pendidikan informal (jalur pendidikan keluarga dan lingkungan) untuk saling bekerja sama dan saling memperluas, jalur pendidikan ada 3 jalur: Pendidikan formal, (2) pendidikan nonformal, (3) pendidikan informal. (Rembangsupu & dkk, 2022)

a. Pendidikan Formal

Pendidikan formal ialah jalur pendidikan yang struktur dan jenjang yang meliputi atas pendidikan usisa dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Pasal 1 ayat 11 UU RI No 20 tahun 2003 tentang pendidikan formal yang meliputi pendidikan dasar. Pada pasal 17 ayat 2 mengemukakan tentang pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar, pendidikan menengah meliputi atas SMP/MTs, pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan SMA/SMK.

b. Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal ialah pendidikan kecakapan hidup, pendidikan usia dini, pendidikan pemuda, pendidikan sekelompok perempuan, pendidikan keterampilan, dan Latihan kerja. Pendidikan di Indonesia itu mempunyai macam-macam salah satunya ialah pendidikan nonformal ada beberapa yang mengemukakan pendapat seperti Marzuki bahwa pendidikan nonformal ialah aktivitas mengajar di luar sekolah atau pendidikan

formal dengan cara organisir, pendidikan formal itu sangat terpisah dengan bagian penting dalam suatu kegiatan yang sangat besar dengan kita layani peserta didik tertentu. (Septiani, 2023).

Pendidikan nonformal ialah satu jalur formal pendidikan yang memiliki sifat belajar yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat fleksibel. Ciri-ciri pendidikan nonformal adalah:

- 1) Pendidikan dengan cara di lakukan jangka pendek.
- 2) Program pendidikan ialah paket dengan spesifik yang biasa ada pada saat diperlukan.
- 3) Syarat enrolmennya sangat fleksibel, bagus secara umur ataupun tingkat kemampuan.
- 4) Syarat untuk mengelolanya jauh dari fleksibel.
- 5) Materi mengajar atau latihan relatif lebih banyak.

Tugas pendidikan nonformal Sebagian tugas pendidikan formal dan informal, tugas pendidikan nonformal ialah menjaga kualitas dan martabat terhadap seseorang dan warga negara untuk mampu dan percaya diri sendiri supaya dapat mengubah supaya lebih maju.

Sifat-sifat pendidikan nonformal adanya peran pendidikan formal dengan pendidikan nonformal, jadi pendidikan nonformal memiliki sifat-sifat yang lebih dari pendidikan formal. Sifat nonformal terdiri dari:

- 1) Pendidikan formal lebih fleksibel sebab menyelenggarakan dengan kemampuan yang dia dapat beberapa bulan.
- 2) Pendidikan nonformal lebih aktif dan efektif dalam bidang-bidang pelajaran tersebut bersifat efektif karena program pemerintah bisa tercapai dengan kebutuhan dan tidak perlu syarat.
- 3) Pendidikan nonformal bersifat *quick yielding* yang berarti waktu yang sangat singkat yang perlu dibuat untuk melatih tenaga kerja yang kita butuhkan.

Syarat-syarat pendidikan nonformal meliputi:

- 1) Pendidikan nonformal harus punya fungsi yang sangat jelas tujuannya untuk melaksanakan suatu yang dirasakan manfaatnya dengan peserta didik atau masyarakat.
- 2) Dilihat dari segi masyarakat pendidikan nonformal yang harus mencapai kemampuannya. Adanya integrasi pendidikan nonformal yang disesuaikan secara terarah dan membangun daerah tersebut.
- 3) Organisasi kesenian. Contoh pendidikan nonformal meliputi : kelompok mengajar, Tempat untuk bermain anak, sanggar kesenian, tempat kursus (Rembangsupu & dkk, 2022).

Ada beberapa asas pendidikan nonformal yaitu: Asas prinsip inovasi menyelenggarakan pendidikan nonformal seperti pertimbangan keperluan peserta didik sehingga dapat dikembangkan dengan cara inovasi nya, hal itu berkaitan dengan cara standar, minimal yang kita tuju, dengan pertimbangan seperti jenis dan tingkat pengetahuan, perilaku, dan terampil, supaya masyarakat memiliki tujuan dan kemampuan.

c. Pendidikan Informal

Pendidikan informal ialah jalur pendidikan keluarga atau masyarakat serta lingkungan untuk membuat kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal di dapat dengan pendidikan formal dan nonformal sesudah peserta didik lulus ujian dengan standar nasional pendidikan, contohnya pendidikan agama, budi pekerti, etika, sifat, perilaku, dan yang lainnya.

Adapun ciri-ciri pendidikan informal ialah:

- 1) Jangan terkait tempat dan waktu.
- 2) Jangan dikaitkan dengan usia.
- 3) Untuk langsung tanpa adanya guru dan siswa secara khusus.
- 4) Jangan memakai metode tersebut.
- 5) Jangan memakai rencana kurikulum (Septiani, 2023).

Jenjang Pendidikan

Menurut pasal 1 ayat 8 UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional ialah pendidikan yang dibuat dengan cara tingkat berkembangnya peserta didik. Untuk mencapai tujuan tersebut dan kemampuan dibuat jenjang pendidikan formal memiliki tiga jenjang antara lain: (1) Jenjang pendidikan dasar, (2) jenjang pendidikan menengah, (3) jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan dasar ialah jenjang pendidikan yang melalui jenjang SMP, (2) Pendidikan dasar terbentuk SD dan sekolah MI, atau seperti yang lainnya sederajat, (3) penentu sekolah dasar yang di sebutkan dalam ayat 1, dan ayat 2 yang telah mengatur peraturan pemerintah.

Pendidikan dasar ialah jenjang pendidikan untuk mendasarkan atau melanjutkan kependidikan ke tingkat yang lebih menengah di antaranya: SD, MI, SMP, MTs, atau seperti yang lainnya sederajat. Pendidikan menengah ialah terusan dari pendidikan dasar, pendidikan menengah melampaui atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan, pendidikan menengah seperti SMA, MA, SMK, MAK, dan seperti lainnya yang sederajat, pendidikan menengah seperti melanjutkan dari pendidikan dasar di antaranya dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan, pendidikan menengah seperti SMA, MA, SMK, MAK, dan seperti yang lainnya sederajat. Pendidikan menengah terdapat hubungan yang fungsinya untuk melanjutkan dan memperluas pendidikan dasar, dan terdapat hubungan

ke atas untuk menyiapkan peserta didik untuk ikut serta pendidikan tinggi maupun masuk ke dalam lapangan kerja.

Menurut pasal 19 perguruan tinggi ialah jenjang pendidikan sesudah pendidikan menengah untuk mencapai program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang telah dibuat oleh perguruan tinggi, pendidikan tinggi di buat oleh sistem terbuka. Menurut pasal 20 perguruan tinggi dapat dibentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi institut, dan universitas, perguruan tinggi wajib membuat pendidikan penelitian, atau mengabdikan terhadap masyarakat (Septiani, 2023).

Perguruan tinggi dapat membuat program akademik, profesi, atau vokasi dengan maksud mengenai perguruan tinggi yang dibuat pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 yang mengatur peraturan pemerintah pendidikan tinggi ialah jenjang pendidikan sesudah pendidikan menengah untuk mencapai program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis doktor yang di buat untuk perguruan tinggi untuk menyiapkan peserta didik supaya mengikuti anggota masyarakat yang mempunyai akademik yang menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian. Supaya kita mencapai tujuan Lembaga pendidikan tinggi supaya kita membuat misi untuk lebih maju, perguruan tinggi mengikuti pendidikan penelitian, dan mengabdikan kepada masyarakat.

Kurikulum Pendidikan di Indonesia

Perubahan dalam kurikulum merupakan bagian dari proses pengembangan dan penyempurnaan antara kurikulum yang sedang berlaku dengan yang telah digunakan sebelumnya. Penyesuaian ini menjadi hal yang penting seiring dengan perkembangan zaman, sebab sistem pendidikan harus terus beradaptasi menuju arah yang lebih maju. Setiap kali kurikulum mengalami perubahan, tentu ada keunggulan dan kekurangan yang menyertainya. (Hamid & dkk, 2020)

Dinamika kurikulum memang bersifat dinamis dan selalu didasari oleh berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Salah satu yang menjadi faktor perubahan dalam kurikulum yakni terdapat pendirian baru tentang proses belajar sehingga timbul berbagai bentuk kurikulum seperti *activity* atau *experience curriculum*, *programmed instruction*, pengajaran modul, dan sebagainya. Perubahan kurikulum yang telah terjadi di Indonesia sebagai berikut:

Kurikulum 1947

Kurikulum 1947 merupakan kurikulum nasional pertama yang diberlakukan di Indonesia pasca kemerdekaan. Kurikulum ini dirancang dalam konteks transisi dari sistem pendidikan kolonial Belanda menuju sistem pendidikan nasional yang mandiri. Sebagai warisan awal pendidikan Indonesia merdeka, kurikulum ini lebih dikenal dengan istilah

Rencana Pelajaran 1947 dan masih sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan Belanda, baik dari segi struktur maupun isi. Fokus utama Kurikulum 1947 adalah pembentukan pribadi manusia Indonesia seutuhnya melalui penanaman nilai-nilai kebangsaan, karakter, dan moral. Tujuan pendidikan diarahkan pada pembentukan manusia yang merdeka, berbudaya, dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Kurikulum ini belum berbasis kompetensi, tetapi menekankan pada penguasaan pengetahuan dan pembentukan sikap.

Kurikulum 1952

Kurikulum 1952 merupakan kurikulum nasional pertama yang dirancang secara sistematis oleh pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan. Secara struktur, Kurikulum 1952 memperkenalkan Rentjana Pelajaran 1952 sebagai pedoman pembelajaran di sekolah-sekolah. Kurikulum ini menekankan pada isi pelajaran (*subject matter centered*), namun tetap mempertimbangkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Salah satu ciri penting dari kurikulum ini adalah adanya pemisahan yang jelas antara pelajaran inti dan pelajaran tambahan, serta mulai diterapkannya prinsip korelasi antar mata pelajaran.

Kurikulum 1964

Kurikulum ini disusun pada penghujung masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada waktu itu, berkembang wacana bahwa proses pembelajaran perlu diarahkan menjadi lebih aktif, kreatif, dan produktif. Oleh karena itu, para guru dituntut untuk membimbing siswa agar memiliki kemampuan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan melalui pendekatan *problem solving*. Metode pembelajaran yang digunakan mengedepankan semangat gotong royong dalam bentuk terpimpin. Selain itu, pemerintah juga menetapkan hari Sabtu sebagai hari krida, yakni hari yang diperuntukkan bagi siswa untuk mengembangkan minat mereka dalam bidang budaya, seni, dan olahraga. (Windiyani & dkk, 2025)

Kurikulum 1968

Kurikulum 1968 disusun oleh pemerintah dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan, karena kurikulum sebelumnya dinilai masih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sepenuhnya selaras dengan semangat UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, kurikulum ini memberikan kebebasan kepada masing-masing sekolah atau guru untuk menyesuakannya. Secara nasional, kurikulum 1968 hanya mencakup garis besar seperti tujuan pembelajaran, materi, metode, dan evaluasi, yang menunjukkan bahwa kurikulum ini telah dirancang dengan pendekatan yang lebih otonom.

Pada kurikulum 1968, fokus pendidikan diarahkan pada pengembangan keterampilan, kecerdasan, serta kesehatan dan kekuatan fisik peserta didik. Penekanan utama kurikulum ini

terletak pada cara pengelompokan materi pelajaran, yang dibagi ke dalam tiga kelompok utama: pembinaan nilai-nilai Pancasila, pengetahuan dasar, dan keterampilan khusus. Kurikulum ini sering disebut sebagai kurikulum bulat karena hanya mencakup mata pelajaran inti, dengan sedikit atau bahkan tanpa tambahan materi pelengkap.

Kurikulum 1975

Kurikulum 1975 merupakan kurikulum pertama yang disusun secara sistematis pasca kemerdekaan Indonesia, yang menandai era baru dalam perencanaan pendidikan nasional. Kurikulum ini lahir sebagai respon terhadap kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan dalam mendukung pembangunan nasional. Disusun berdasarkan pendekatan tujuan instruksional, Kurikulum 1975 mengadopsi prinsip-prinsip dari teori pendidikan modern, khususnya yang berorientasi pada pencapaian tujuan belajar secara terukur. (Windiyan & dkk, 2025)

Kurikulum 1984

Kurikulum 1984 merupakan pengembangan dari Kurikulum 1975 dan mulai diterapkan secara nasional pada tahun ajaran 1984/1985. Ciri utamanya adalah pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), yang mendorong siswa aktif dalam proses belajar. Kurikulum ini menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik serta menggunakan pendekatan spiral dalam penyusunan materi. Meskipun menghadapi kendala dalam implementasi, seperti kurangnya kesiapan guru dan keterbatasan fasilitas, Kurikulum 1984 menjadi tonggak penting dalam perubahan pendekatan pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa.

Kurikulum 1994

Kurikulum 1994 merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 1984 dan mulai diterapkan secara nasional pada tahun ajaran 1994/1995. Kurikulum ini mengusung pendekatan keterpaduan, yang menekankan keterkaitan antar mata pelajaran secara tematik. Fokus utama kurikulum ini adalah pada penguasaan materi akademis dan pencapaian target kurikuler yang terukur. Meskipun demikian, kurikulum ini dikritik karena terlalu padat dan kurang memberi ruang bagi kreativitas siswa. Sistem semester diperkenalkan, dan peran guru sangat dominan dalam proses pembelajaran. Seiring waktu, berbagai tantangan dalam implementasinya mendorong lahirnya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) sebagai penggantinya pada awal 2000-an.

Kurikulum 2004

Kurikulum 2004, yang dikenal sebagai Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, sikap, dan minat peserta didik agar mampu melakukan berbagai tugas dengan kemahiran, ketepatan, dan

keberhasilan. Salah satu karakteristik utama KBK adalah penekanan pada pencapaian kompetensi siswa, baik secara individu maupun kelompok. Kurikulum ini juga menyoroti pentingnya keberagaman serta hasil belajar. Proses pembelajaran dilaksanakan melalui berbagai pendekatan dan metode yang bervariasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. (Windiyan & dkk, 2025)

Kurikulum 2006 (KTSP)

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mulai diterapkan secara nasional pada tahun 2006 sebagai pengganti Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004. KTSP dikembangkan berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yang memberikan otonomi kepada sekolah untuk menyusun kurikulum sesuai kebutuhan peserta didik dan kondisi lokal. Meskipun berlandaskan pendekatan berbasis kompetensi, KTSP memberikan fleksibilitas lebih besar dalam penyusunan silabus dan rencana pembelajaran. KTSP menandai pergeseran dari sistem kurikulum yang terpusat ke desentralisasi dengan tujuan meningkatkan relevansi dan kualitas pembelajaran. Namun, pelaksanaannya menghadapi tantangan seperti ketimpangan kualitas antar sekolah dan kesiapan guru dalam mengembangkan kurikulum secara mandiri.

Kurikulum 2013 (K-13)

Kurikulum 2013 mulai diterapkan di Indonesia pada tahun ajaran 2013/2014 sebagai rancangan pembelajaran yang bertujuan membentuk peserta didik yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Kurikulum ini menekankan pengembangan kompetensi secara seimbang, mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Salah satu ciri utama Kurikulum 2013 adalah dorongan bagi siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran, mulai dari mencari, mengolah, membangun hingga menerapkan pengetahuan. Dengan pendekatan ini, siswa tidak sekadar menerima informasi secara pasif dari guru, tetapi berperan aktif dalam memahami materi. Kurikulum ini dirancang agar tujuan pembelajaran dapat dicapai melalui materi dan sumber ajar yang relevan. Selain itu, pembelajaran diselaraskan dengan standar kompetensi lulusan sebagai acuan bagi pendidik dalam mengevaluasi capaian belajar siswa (Shobirin, 2016).

Kurikulum Merdeka Tahun 2022

Kurikulum Merdeka diperkenalkan pada tahun 2022 sebagai respons terhadap tantangan pendidikan di era global yang dinamis. Kurikulum ini memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Fokus utama Kurikulum Merdeka adalah pengembangan kompetensi abad ke-21 seperti kreativitas, berpikir kritis, kolaborasi, dan karakter berdasarkan nilai- nilai

Pancasila. Pendekatan pembelajarannya lebih berpusat pada siswa, memungkinkan eksplorasi minat dan pengembangan keterampilan secara mandiri. Meski menghadapi tantangan dalam hal kesiapan sumber daya dan infrastruktur, Kurikulum Merdeka diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan dan relevan dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan perubahan beberapa kurikulum di atas, maka Perkembangan kurikulum di Indonesia mencerminkan dinamika kebutuhan masyarakat, perubahan kebijakan nasional, dan tuntutan global. Sejak kemerdekaan hingga era modern, sistem pendidikan Indonesia telah mengalami berbagai perubahan kurikulum, mulai dari Kurikulum 1947 hingga Kurikulum Merdeka yang diterapkan saat ini. Setiap kurikulum yang lahir membawa karakteristik yang khas dan mencerminkan respons terhadap konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya pada masanya (Windiyani & dkk, 2025)

Kurikulum 1975, misalnya, dipengaruhi oleh konsep manajemen modern seperti *management by objective* (MBO) yang menekankan pada efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Kemudian Kurikulum 1984 mencoba memperbaiki pendekatan ini dengan lebih memfokuskan pada keaktifan siswa melalui pendekatan belajar aktif seperti mengamati dan melaporkan. Selanjutnya, Kurikulum 1994 menekankan pada pembentukan keterampilan kerja sebagai respons terhadap kebutuhan tenaga kerja di masa depan, meskipun dalam implementasinya menimbulkan permasalahan yang memerlukan revisi berupa Suplemen Kurikulum 1994. Perubahan terus berlanjut melalui Kurikulum 2004 (KBK), Kurikulum 2006 (KTSP), Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka yang menekankan pada personalisasi pembelajaran dan penguatan profil pelajar Pancasila.

Perubahan kurikulum di Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal seperti kebijakan pemerintah, arah pembangunan, dan kualitas SDM, serta faktor eksternal seperti globalisasi, teknologi, dan tuntutan abad ke-21. Pergeseran dari pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru ke peserta didik juga turut membentuk isi dan metode kurikulum. Dalam proses implementasinya, kurikulum di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan.

Perbedaan kualitas dan fasilitas pendidikan antarwilayah menjadi kendala utama, terutama dalam pelaksanaan kurikulum baru seperti Kurikulum Merdeka. Tidak semua sekolah memiliki akses yang memadai terhadap pelatihan guru, sarana belajar, maupun teknologi pendukung. Selain itu, kesiapan guru dalam mengubah pendekatan pembelajaran dan menyesuaikan diri dengan filosofi baru dalam kurikulum juga menjadi persoalan serius. Tantangan lain adalah inkonsistensi kebijakan pendidikan akibat pergantian pemerintahan yang sering kali berdampak pada ketidakstabilan arah implementasi kurikulum.

Meski berbagai tantangan muncul, terdapat sejumlah kesempatan yang bisa dimaksimalkan. Kurikulum Merdeka, contohnya, memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk merancang pembelajaran yang lebih relevan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Pemanfaatan teknologi juga membuka jalan untuk mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas. Selain itu, dengan fokus pada penguatan nilai-nilai Pancasila dan penguasaan keterampilan abad ke-21, kurikulum ini berperan dalam membentuk generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga tangguh, inovatif, dan berkarakter (Windiyan & dkk, 2025)

Oleh karena itu, dalam merumuskan dan menerapkan kurikulum, diharapkan penyusunannya dilakukan dengan sangat teliti agar mampu mengantisipasi kebutuhan masyarakat di masa depan dan menghindari perubahan kurikulum yang terus-menerus. Pelaksanaan kurikulum juga perlu didukung oleh pengawasan yang berkelanjutan agar pelaksanaannya tetap sejalan dengan tujuan awal. Selain itu, penting untuk memastikan pemahaman yang tepat tentang kurikulum oleh para pendidik sebagai pelaksana utama, mengingat masih banyak guru yang belum sepenuhnya memahami kurikulum yang sedang diterapkan. Semua ini bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan secara lebih efektif dan efisien di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan Indonesia merupakan suatu kesatuan yang dinamis dan terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman, kebijakan politik, dan kebutuhan masyarakat. Pendidikan di Indonesia sejak masa Hindu-Buddha, masuknya Islam, kolonialisme, hingga masa Reformasi dan Kurikulum Merdeka menunjukkan bahwa arah dan bentuk pendidikan selalu dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Landasan hukum yang kuat melalui UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 telah memberikan kerangka dasar, namun tantangan seperti kesenjangan kualitas antarwilayah, keterbatasan sarana, serta kesiapan pendidik masih menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan agar pemerintah terus memperkuat konsistensi kebijakan pendidikan, khususnya dalam implementasi kurikulum agar tidak terlalu sering berubah sehingga memberi ruang bagi guru dan sekolah untuk beradaptasi secara maksimal. Perlu adanya peningkatan kualitas dan kompetensi guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan, serta pemerataan fasilitas agar kualitas pendidikan dapat dirasakan merata di seluruh daerah. Penelitian ini juga masih memiliki keterbatasan karena

hanya menggunakan pendekatan studi kepustakaan, sehingga penelitian lanjutan dengan metode lapangan sangat dianjurkan untuk memperoleh gambaran yang lebih empiris mengenai implementasi sistem pendidikan di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para dosen pembimbing serta rekan-rekan sejawat yang telah memberikan masukan, saran, dan arahan sehingga artikel ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa penulis menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyediaan literatur dan referensi, sehingga memperkaya hasil penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Ainun, D. (2020). *Filsafat pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Aprilia Windiyani, I., dkk. (2025). Analisis kurikulum di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Education*, 1(1), 38–39.
- Budiarti, Y. (2018). Pendidikan dan pembelajaran berdasarkan dari sudut pandang histori. *Jurnal Majalah Kreasi STKIP MPL*, 10(2), 18–31.
- Fadli, M. R., & Kumalasari, D. (2019). Sistem pendidikan Indonesia pada masa orde lama (periode 1945–1966). *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 9(2), 157. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v9i2.4168>
- Garuda Pramuka. (2016). *Konsep pendidikan nasional*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hakim, I. N. (2012). Pendekatan sistem dalam pembelajaran. *Jurnal Insania*, 16(2), 202.
- Hamalik, O. (2002). *Perencanaan pengajaran berdasarkan pendekatan sistem*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamid, A., dkk. (2020). *Manajemen pengembangan kurikulum*. Indramayu: CV Adanu Abimata.
- Hanipudin, S. (2019). Pendidikan Islam di Indonesia dari masa ke masa. *Matan: Journal of Islam and Muslim Society*, 1(1), 39. <https://doi.org/10.20884/1.matan.2019.1.1.2037>
- Juhri, A. M. (2010). *Pendidikan nasional dan tantangan zaman*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kamaruddin, I. (2022). *Pengantar konsep ilmu pendidikan*. Batam: CV Rey Media Grafika.
- Mahmud. (2013). *Pemikiran pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Nurwahyuni, K., & Hudaidah, H. (2021). Sejarah sistem pendidikan di Indonesia dari masa ke masa: Sebuah studi literatur. *Jurnal Berkala Ilmiah Pendidikan*, 1(2), 55–56. <https://doi.org/10.51214/bip.v1i2.91>
- Rembangsupu, A., dkk. (2022). Studi yuridis tentang jenis dan jalur pendidikan di Indonesia.

- Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 5(4), 93.
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.337>
- Saiin, A. (2017). Reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan nasional. *Jurnal Hukum*, 33(2), 182. <https://doi.org/10.24002/jep.v33i2.1603>
- Sanjaya, W. (2007). *Strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Septiani, V. (2023). Jenis dan jenjang pendidikan dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. *Attaqwa: Jurnal Pendidikan Islam dan Anak Usia Dini*, 2(3), 120.
- Shobirin, M. (2016). *Konsep dan implementasi kurikulum 2013 di sekolah dasar*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Syafi'i. (2020). *Politik pendidikan agama di sekolah (Studi tentang polemik pendidikan agama dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional)*. Tangerang Selatan: Young Progressive Muslim.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. (2010). *Tentang sistem pendidikan nasional, Bab I Pasal 1 Ayat 2*. Jakarta: Sinar Grafika.